

Program Deradikalisasi Dalam Perspektif Komunikasi Politik

Susilastuti Dwi Nugrahajati^{1*}, Basuki Agus Suparno²

^{1,2}Ilmu Komunikasi FISIP UPN "Veteran" Yogyakarta, Jl. Babarsari Jl. Tambak Bayan No.2, Yogyakarta

E-mail: susilastuti@upnyk.ac.id¹ ; basuki.agussuparno@upnyk.ac.id²

0812-2770-854¹ ; 0815-8453-0681²

Abstract

Terrorist groups in their activities that emphasize violence, threats and fear are basically conveying a political message to the country and the state. In their activities, they use detailed communication management by paying attention to communication components such as communicators, messages and media use. Deradicalization is a soft power approach to counter and reduce the radicalism which carried out by BNPT with persuasion method. As a soft power approach, this program was functioned to control the former terrorist who were sentenced in jail return to the Republic of Indonesia. In fact, the Deradicalization program cannot directly encourage the former terrorist who had in jail return to society. Based on the results of research on the former of terrorist who were sentenced in jail, showed that the program should not only focus on how they spent the time and adapt to society but it should also focus on the probable of rejoin to terrorist group and organization which located in the outside, for instance family members who still communicate with members of their group. Thus, DE-radicalization program especially related to communication efforts are needed to consider the selection of communicators, message content, communications and the media to be used to prevent and capture invisible information which gained from ex-terrorists.

Keywords: Terrorism, deradicalization, communicators, communicaters, messages and media

Abstrak

Kelompok teroris dalam aktivitasnya yang mengedepankan kekerasan, ancaman, dan ketakutan pada dasarnya menyampaikan pesan politik kepada negara. Dalam kegiatannya mereka menggunakan manajemen komunikasi yang detail dengan memperhatikan komponen-komponen komunikasi seperti komunikator, pesan dan penggunaan media. Deradikalisasi merupakan pendekatan soft power untuk melawan radikalisme yang dilakukan BNPT dengan menggunakan pendekatan persuasi. Deradikalisasi yang dilakukan BNPT merupakan pendekatan soft power untuk mengajak mantan narapidana teroris kembali ke NKRI. Program deradikalisasi tidak bisa serta merta mendorong mantan narapidana untuk kembali ke masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian terhadap mantan narapidana, program deradikalisasi sebaiknya tidak hanya terfokus pada mereka yang sedang menjalani hukuman, namun juga pihak luar yaitu anggota keluarga yang masih berkomunikasi dengan anggota kelompoknya. Program deradikalisasi perlu mempertimbangkan pemilihan komunikator, isi pesan, komunikasi dan media yang akan digunakan.

Kata kunci: Terorisme, deradikalisasi, komunikator, komunikan, pesan dan media

Pendahuluan

Kehadiran kelompok penekan dalam satu negara menjadi sebuah keniscayaan. Merujuk pada sistem politik posisi kelompok penekan ini ada di tingkat infrastruktur politik. Keberadaan kelompok penekan dalam dinamika komunikasi politik memainkan peran yang seringkali menimbulkan *resonansi*, iritasi, pada tatanan kehidupan sosial politik masyarakat.

Kelompok penekan dalam menyampaikan pesan politik di dalam sistem politik dibingkai dengan kepentingan

kelompok. Tuntutan yang disampaikan biasanya memberikan tekanan kepada struktur kuasa untuk mengakomodasikan kepentingannya. Kepentingan kelompok seringkali berseberangan dengan kepentingan negara dan saat bersamaan menimbulkan ketegangan dan konflik.

Kelompok penekan biasanya bergerak atas kesamaan kepentingan dan ideologi. Kesamaan atas ideologi ini kemudian memicu terjadinya mobilisasi, afiasi, fanatisme dan fatalism. Namun tidak jarang kelompok kepentingan yang mendasarkan kepentingan

ideologi juga memiliki agenda tertentu atau agenda-agenda tersembunyi lainnya yang terkadang merambah pada persoalan politik.

Kelompok penekan ini seringkali memicu munculnya *social movement* dan menyeret kelompok-kelompok yang memiliki ideologi yang sama. *Social movement* yang muncul mulai dari taraf yang paling demokratis hingga paling ekstrim dan radikal. Situasinya dapat menentukan derajat kooperatif atau perlawanan yang sampai pada tingkat *zero sum game*. Apalagi terhadap kelompok penekan yang anonim, terselubung, dan bersifat random.

Beberapa contoh *social movement* yang menjerat publik dan berujung pada *chaos* seperti gerakan Tiananmen Square (1989), demonstrasi yang mengutuk kartun Nabi Muhammad di Denmark (2006), Aksi 212 di Indonesia (2012) yang membelah masyarakat Indonesia hingga saat ini. Aksi 212 ini menyebabkan terjadinya polarisasi politik di Indonesia.

Kelompok penekan yang paling ekstrem adalah organisasi teroris. Bagi kelompok teroris, aksi mereka sebagai sebuah perjuangan politik (Junaidi, 2017). Bahkan sebenarnya kelompok teroris dapat dipandang sebagai bagian dari aktor politik yang beroperasi dalam sistem politik. Di Indonesia sendiri kelompok teroris seringkali dikaitkan dengan radikalisme.

Terorisme adalah salah satu kelompok penekan yang berada di infrastruktur politik. Terorisme dalam mengkomunikasikan pesan akan mengedepankan koersi dan persuasi. Bahkan tindakan mereka sering kali muncul sebagai respon terhadap penilaian mereka atas ketidakadilan yang ada khususnya apa yang dilakukan penguasa.

Isu terorisme dan gerakan radikal mulai mengemuka dan menjadi perbincangan di berbagai media pasca runtuhnya komunisme secara global. Isu terorisme semakin menguat pasca terjadinya peledakan Gedung World Trade Center (WTC) di New York 11 September 2001. Kejadian itu menjadi teror terburuk bagi Amerika Serikat.

Aksi teror terus berlanjut diberbagai belahan dunia. Aksi teror ini telah berubah

dan menjelma ke dalam bentuk aksi yang bersifat radikal, keras dan menimbulkan tragedi kemanusiaan. Aksi yang dilakukan kelompok teroris ini sudah menjadi gejala dunia dengan target sasaran yang bermacam-macam seperti sarana dan prasarana publik, perkantoran pemerintah, hotel, dan tempat-tempat strategis lainnya yang berkaitan dengan sistem politik negara.

Indonesia menjadi salah satu negara yang tidak bisa terlepas dari sasaran kelompok teroris ini. Beberapa saat setelah bom di WTC New York, terjadi peristiwa Bom Bali I Tahun 2002 dengan korban meninggal dunia sebanyak 202 orang. Pelakunya sendiri diduga dari Jama'ah Islamiah. Setelah itu aksi terorisme beberapa kali terjadi. Misalnya, tahun 2009 Bom JW Marriot dengan korban 14 meninggal dunia dan 154 luka. Pelaku diduga dari kelompok yang berafiliasi kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Kelompok yang berafiliasi ISIS di Indonesia, melakukan aksi terorisme, seperti di Sarinah Jl Thamrin tahun 2016, aksi bom Gereja Oikumene di Samarinda tahun 2016, dan aksi Bom Gereja Surabaya tahun 2018 (<https://www.voaindonesia.com>, 2023).

Kebijakan pemerintah untuk meredam aksi teror dan terorisme ini bisa melalui pendekatan *hard power* yang mengedepankan penggunaan kekuatan negara dan *soft power* yang lebih menekankan pada pendekatan persuasif melalui berbagai sarana. Indonesia menggunakan kedua pendekatan itu untuk penanggulangan dan pencegahan terorisme.

Program yang dikembangkan oleh pemerintah untuk menanggulangi dan mencegah aksi terorisme sekarang ini adalah program deradikalisasi. Program deradikalisasi tertuang dalam pasal 34D UU Nomor 5 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2013 yang mengatur Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme.

Sebagai program, deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, berkesinambungan, terpadu, sistematis dan

memiliki target-target capaian yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan mengembalikan pemahaman radikal dan pemikiran terorisme yang telah terjadi kembali ke pangkuan NKRI. Sasaran program ditujukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana dan narapidana tindak pidana terorisme yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait. Dalam hal ini ada Kementerian terkait yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum dan HAM, Kejaksaan, dan Polri di bawah koordinasi BNPT. Dalam peraturan tersebut mitra BNPT untuk melaksanakan program deradikalisasi mencakup akademisi, praktisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. ((Pasal 1, pasal 2 Peraturan BNPT No 1 Tahun 2022).

Program deradikalisasi juga dilakukan di beberapa negara yang rawan terhadap aksi-aksi terorisme. Pemerintah Nigeria, misalnya dalam melawan kelompok terorisme Boko Haram juga menggunakan *hard power* dan *soft power* (deradikalisasi). Program deradikalisasi dinilai bisa membantu mendekonstruksi ideologi ekstrem, bisa memfasilitasi rehabilitasi dan reintegrasi mantan kombatan (Hakeem, 2020). Keberhasilan program deradikalisasi dalam perspektif dan tujuan semacam itu, keberhasilannya dapat dilihat salah satunya jumlah napi terorisme yang telah menyatakan ikrar setia pada NKRI cukup signifikan.

Sebagai gambaran tahun 2022 (dalam periode Januari-September) menurut Kemenhukum ada Tahun 2022 (Januari-Setember) terdapat 108 orang, tahun 2023 ada 76 napi teroris di Lapas Kelas II A Gunung Sindur dan ada dua orang napi terorisme Lapas I Madiun yang melakukan ikrar setia NKRI (<https://lampung.antaranews.com>, 2023).

Napi terorisme ini selama berada dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) oleh BNPT dan instansi terkait telah mendapatkan pembinaan mulai dari aspek ideologi, pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, ketrampilan kewirausahaan sebagai bekal kembali ke masyarakat.

Namun dalam realitanya setelah mereka

menyatakan ikrar setia kepada NKRI dan kembali ke masyarakat tidak serta merta mereka tidak kembali masuk dalam kelompoknya. Hal ini dikemukakan oleh Kapala BNPT Komjen Pol Boy Raffi Amar dari 1.192 eks narapidana terorisme (napiter) yang mengikuti kegiatan deradikalisasi di luar lapas, ada sebanyak 116 eks napiter kembali terlibat kasus terorisme (<https://news.detik.com>, 2023).

Menjelang pemilu 2024 Datestemmen Khusus Anti (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap sebanyak 40 orang tersangka terorisme, yang diduga akan menggagalkan pelaksanaan Pemilu 2024 yang mengganggu kestabilan sistem politik. Para tersangka terorisme ditangkap di Jawa Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Tengah (<https://news.detik.com>, 2023).

Penangkapan para tersangka terorisme tersebut menunjukkan bahwa program deradikalisasi melalui pembinaan selama di dalam maupun setelah keluar dari lapas tidak secara otomatis, menghentikan langkah tidak terjalin lagi dan tidak berkomunikasi dengan kelompok lamanya. Hal ini berpotensi untuk masih memikirkan dan bertindak lebih lanjut dan mendalam.

Deradikalisasi merupakan gagasan mengenai kewarganegaraan Indonesia yang baik (Muhammad A, 2021), dan yang ideal yang maknanya dibentuk oleh kekuasaan. Deradikalisasi adalah sebuah proyek hegemonik yang berusaha mendominasi dan mengontrol makna sebagai warga negara Indonesia yang baik.

Program deradikalisasi merupakan upaya penanganan dan pembinaan yang dilakukan, tidak hanya selama napiter berada dalam lapas, namun juga untuk tetap setia kepada NKRI, sehingga bisa beradaptasi dalam masyarakat. Hal ini penting dicermati mengingat aksi terorisme yang selama ini dilakukan, sesungguhnya telah memunculkan perbedaan klaim ideologi serta tatanan sebuah bangsa antara kelompok teroris dengan struktur kuasa serta masyarakat luas di sisi lainnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini melihat bagaimana model komunikasi mantan napiter setelah keluar

lapas dengan struktur kuasa. Kajian ini dirasa penting sebagai upaya untuk meminimalkan anggapan bahwa deradikalisasi hanyalah sebuah proyek pemerintah dengan mantan napiter sebagai obyeknya.

Fokus kajian menekankan pada dinamika komunikasi yang perlu dibangun serta sumberdaya yang perlu disediakan agar ada *frame of reference* yang sama atas hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Penelitian ini melihat program deradikalisasi dalam perspektif komunikasi politik

Metode Penelitian

Kajian dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif, untuk mengungkap makna-makna dan peristiwa yang disampaikan oleh informan penelitian.

Malalui metode kualitatif, prosedur yang dilakukan membantu menjawab pertanyaan penelitian untuk melihat pelaksanaan program deradikalisasi dalam perspektif komunikasi politik di Indonesia. Penelitian diawali dengan alur induktif yaitu untuk melihat proses penanggulangan dan pencegahan terorisme di Indonesia.

Sumber data penelitian diperoleh melalui Focus Group Discussion (FGD) kepada mantan napiter yang telah menyatakan ikrar untuk setia pada NKRI. Jumlah mantan napiter yang terlibat dalam FGD adalah 15 orang. Para mantan napiter tersebut telah menjalani hukuman rata-rata 4 tahun ke atas dan terhubung dalam aksi teror di beberapa tempat, seperti teror di Surabaya, Solo, Malang, Poso, Cirebon dan Jakarta. Informan saat ini telah membaur dengan masyarakat dan telah memiliki usaha, serta pernah dilibatkan dalam kegiatan deradikalisasi. FGD dilaksanakan di Solo karena para mantan napiter ini berdomisili di Solo dan sekitarnya.

Sumber data sekunder diperoleh melalui kajian literatur dan riset-riset terkait dengan deradikalisasi untuk menemukan kebaruan dalam penelitian ini. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber

dan dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang selama ini melakukan penelitian terkait terorisme dan deradikalisasi. Triangulasi teori untuk mengkaji apakah model komunikasi dari temuan penelitian ini tepat.

Hasil Penelitian

Dalam sistem politik negara umumnya terdapat dua struktur yang akan saling terhubung dalam menyampaikan *feed back* atau umpan balik yaitu infrastruktur politik dan suprastruktur politik. Media massa baik media *mainstream* maupun *new media* menempati posisi strategis untuk menghubungkan antar struktur politik. Selain menggambarkan dinamika yang terjadi dalam politik, media menjembatani antar aktor politik yang beroperasi dalam sejumlah arena politik yang ada.

Di tingkat infrastruktur ada partai politik yang menjalankan fungsi agregasi kepentingan, dan kelompok kepentingan yang menjalankan fungsi artikulasi kepentingan yang mendeskripsikan sebaran aktor politik yang ada seperti kelompok penekan, masyarakat, tokoh politik, dan wartawan. Sementara di tingkat suprastruktur terdiri dari eksekutif, legislative dan yudikatif.

Kelompok penekan yang menjadi kajian penelitian ini adalah kelompok terorisme. Terorisme merupakan salah satu kelompok penekan yang dalam aktivitas komunikasi politik berupaya menyampaikan aspirasi, pendapat berupa dukungan atau tuntutan kepada sistem politik dengan menggunakan cara-cara koersif atau persuasif.

Terorisme adalah paham dan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan kerusakan atau kehancuran atas obyek-obyek vital secara strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitasi internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan (pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Terorisme, pasal 1 PP nomor 77 tahun

2019 tentang pencegahan tindak pidana terorisme dan perlindungan terhadap penyidik, penuntut umum, hakim dan petugas pemasyarakatan).

Terorisme sebagai tindakan kekerasan atau ancaman ditujukan terhadap sasaran secara acak dan ditujukan dalam rangka memaksakan kehendak kepada pihak yang dianggap lawan oleh kelompok teroris agar tujuannya dihargai (Mustofa, 2002), Terorisme adalah strategi kekerasan yang dirancang untuk meningkatkan hasil-hasil yang diinginkan dengan cara menanamkan ketakutan dalam masyarakat. Terorisme adalah kekerasan, namun tidak semua bentuk kekerasan adalah terorisme (Hendropriyono, 2009).

Terorisme sebagai paham, gerakan dan kelompok yang mengedepankan cara-cara kekerasan dalam mencari perhatian dan mencapai tujuannya tidaklah bergerak dalam ruang yang kosong, namun juga dalam menyampaikan pesan kepada negara menggunakan pola-pola komunikasi yang sangat kompleks baik komunikasi internal maupun komunikasi eksternal.

Pola-pola komunikasi internal meliputi pada siapa pembawa perintah dan siapa pelaksana perintah. Koordinasi dan konsolidasi internal inilah yang seharusnya dapat dideteksi secara dini. Pola-pola komunikasi yang kompleks dan tertutup inilah yang sulit dideteksi bahkan oleh kemampuan intelijen negara sekalipun sehingga seolah-olah tiba-tiba meledak dan pecah kasus. Jadi, ada sebuah proses yang panjang dan berliku sehingga penting untuk dicari pemicunya. Munculnya kelompok-kelompok radikal bisa dipicu dari beberapa sebab salah satunya adalah kegagalan negara dalam memberikan pemahaman atas ideologi kepada masyarakat dimana pada akhirnya mereka akan mencari. Dalam pencarian mereka atas ideologi adalah pintu masuk paham radikal.

Kelompok teroris ini bekerja bukan tanpa perencanaan, mereka menggunakan beberapa cara untuk bisa menarik simpati masyarakat. Sebagai organisasi, kelompok teroris tertata rapi dan mereka memiliki program dengan

memanfaatkan media yang ada. Propaganda terorisme sebagaimana dikemukakan oleh Walter Lequeur senantiasa melibatkan media (Lequeur, 2005). Propaganda yang dilakukan adalah melalui aksi dan selalu mengikutsertakan media. Kelompok teroris membutuhkan media untuk aksinya, dalam upayanya mencari simpati masyarakat). (Junaid, volume 2 tahun 2013), (Nursalim, volume 8 tahun 2017).

Dalam usaha menyebarkan ide-idenya, kelompok terorisme menggunakan metode humas dan manajemen media untuk mengartikulasikan kepentingannya (Junaidi, 2017). Media digunakan untuk membangun dan menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang simpati dan mendukungnya, sedangkan manajemen media digunakan untuk mengelola dan mengorganisasikan pesan-pesan tersebut.

Di era digital, kelompok terorisme juga memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk menarik simpati publik dan aksi-aksi terornya. Ruang maya menawarkan kesempatan yang lebih aman dan menjanjikan.

Tahapan menjadi seorang teroris memberikan gambaran bahwa mereka mengalami proses pematangan dan observasi keanggotaan satu sama yang lain yang mencakup penilaian psikologis mereka untuk benar-benar siap dan total. Proses ini untuk melihat apakah seseorang telah masuk secara kaffah dan telah menunjukkan loyalitasnya pada gerakan.

Keterlibatan mereka dalam gerakan radikal dimulai dengan mengikuti kegiatan keagamaan, mengikuti pengajian, salah memilih teman sehingga salah dalam memahami ajaran agama.. Menurut penuturan salah satu narasumber mengatakan: “... saya salah pergaulan sehingga mempunyai pemahaman yang salah tentang ideologi... “ .(wawancara dengan napiter Ibrh, 10 Juni 2023)

Faktor ideologi seringkali dianggap menjadi penyebab seseorang terlibat dalam gerakan radikal. Pemahaman napiter terkait ideologi yang dianggap benar, tidak terlepas dari lingkungan pergaulan. Berikut penjelasannya:

“... komunikasi kami dengan kelompok

menggunakan media social terutama telegram. Tapi kami tidak mengenal satu sama lain...” tutur Ab Napiter yang terlibat kasus Bom Surabaya (FGD Solo, 12 Juli 2023)

Napiter juga menggunakan email untuk mengkomunikasikan kepada anggota lain tentang kegiatan yang dilakukan kelompoknya. Hal ini seperti yang dikemukakan seorang napiter yang terlibat kasus Poso, yang memaparkan:

“Saya tertangkap karena saya yang mengirim pesan via email. Saya tidak begitu paham kalau ternyata hal itu terkait dengan kasus kekerasan di Poso...”. Wawancara dengan AW, 15 Juli 2023)

Persoalan teror dan terorisme terus bergulir dan sulit dihentikan, bahkan fenomena semacam ini hadir dalam berbagai bentuk di berbagai negara. Setiap negara sebaiknya melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya teror dan terorisme untuk memberi jaminan rasa aman terhadap warganegaranya. Hal ini dimaksudkan supaya negara dapat meminimalkan aksi terorisme dengan melakukan kontra terorisme baik secara *hard power* (penegakan hukum) maupun *soft power*.

Program deradikalisasi bukanlah program yang mudah, mengingat para napiter memiliki keyakinan ideologi yang kuat dan senantiasa berseberangan dengan ideologi negara. Dalam konteks ini, program deradikalisasi harus bisa menyakinkan bahwa ideologi mereka tidak tepat diterapkan di Indonesia. Program deradikalisasi merujuk pada upaya mengubah pandangan dan sikap seseorang yang telah memiliki paham radikal. Deradikalisasi mengarah pada upaya untuk mengubah ideologi dan tindakan seseorang (Noricks, 2009)

Komunikator, yang akan menyampaikan pesan tentang maksud dan tujuan program deradikalisasi, sangat menentukan keberhasilan. Program deradikalisasi tidak hanya melibatkan pemerintah dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, tetapi juga melibatkan akademisi, komunitas, masyarakat, dunia usaha dan media. Lima unsur dalam mengupayakan program deradikalisasi adalah pemerintah,

masyarakat, akademisi, pelaku usaha dan media yang disebut sebagai pendekatan pentahelix.

Implementasi model pentahelix menjelaskan bahwa program deradikalisasi dimaksudkan untuk menemukan model yang tepat dan dapat diterapkan, namun yang masih belum maksimal terlibat dalam model pentahelix adalah media dan komunitas bisnis (Muhammad A, 2021).

Sejauh ini menurut peserta FGD, program deradikalisasi yang diterima selama menjalani masa tahanan, berasal dari BNPT dan Kementerian Hukum dan HAM. Dalam program deradikalisasi tersebut, mantan napiter yang telah menyatakan dirinya masuk NKRI juga diundang untuk berdiskusi dengan para napiter dan sekaligus bertindak sebagai komunikator. Pendekatan yang dilakukan dalam kegiatan deradikalisasi adalah dialog dan penyuluhan, dengan materi meliputi ideologi, wawasan kebangsaan.

Mantan napiter mengakui setelah adanya program deradikalisasi membuka wacana baru untuk melihat kembali apa yang selama ini telah dilakukan. Ada pengakuan bahwa selama ini ada penyesatan dan kemampuan untuk menyesatkan orang lain dalam cara bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam organisasi teroris yang diikutinya. .

“...setelah mengikuti program deradikalisasi sekarang saya menyadari bahwa kami memahami ideologi kami dengan cara yang salah. Saya akan kembali seperti warga negara seperti semua dan kembali berkiprah agar berguna bagi bangsa dan negara...”. (wawancara dengan Zmd mantan napiter, 12 Juli 2023)

Hal ini berbeda dengan Ab napiter yang pernah menjadi anak buah Nurdin M Top, yang memaparkan bahwa dasarnya seseorang terlibat dalam kegiatan terorisme memiliki ideologi sendiri yang tentunya berbeda dengan ideologi bangsa dan menganggap negara Indonesia itu salah atau thogut, *“.... Indonesia dengan ideologi Pancasila dan ideologi mereka itu ibarat air dan api. Masing-masing merasa paling benar sendiri...”* (pernyataan Ab dalam kegiatan FGD 12 Juli 2023)

yang akan direkrut untuk masuk dalam jaringan organisasi. Mereka memanipulasi program sehingga memunculkan daya tarik dan membuat target terkesan serta membenarkan pandangan dan pemikiran mereka melalui aktivitas yang mengedepankan ideologi dan doktrin.

Sebagai gambaran melalui media berbasis internet ISIS menyebarkan propaganda dan melakukan perekrutan WNI untuk bergabung di Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). BNPT menyebutkan *foreign terrorist fighter* WNI yang terjebak dengan propaganda ISIS ada sebanyak 2.113 orang. Dari jumlah itu yang masih di zona konflik ada sebanyak 1.251 orang, yang meninggal dunia 111 orang, yang sudah kembali sebanyak 195 orang, dan menjadi deportasi sebanyak 556 orang (<https://news.detik.com>, 2021).

Data di atas memberikan gambaran kekuatan media sosial sebagai media propaganda ISIS. Kemajuan teknologi komunikasi menjadi salah satu alat terorisme dalam menyebarkan propaganda kelompok mereka. Selain komunikasi yang terjadi dalam perekrutan langsung dalam jaringan tertutup, juga dilakukan dengan menggunakan *media online*.

Merujuk penelitian yang pernah dilakukan Ahmad Sulfikar media sosial dan jaringan internet merupakan sarana untuk penyebaran paham radikalisme kepada masyarakat yang memiliki konektivitas dengan internet (Zulfikar, volume 4 tahun 2019). Pengguna media social di Indonesia adalah pasar potensial bagi bagi kelompok radikal untuk menyebarkan propaganda tentang radikalisme. Proses yang harus dilewati seseorang menjadi radikal tidak ada yang pasti. Namun semua melalui rekrutmen (Karsono, 2018).

Kelompok terorisme dapat memanfaatkan media dalam menyampaikan program aksinya melalui media sosial dalam berbagai platform, serta melalui lembaga pendidikan yang beroperasi secara kamufase dan tidak langsung. Aktor perekrutan akan menyampaikan program aksinya yang disesuaikan dengan target atau kelompok sasaran (komunikan), dan media yang akan digunakan untuk menyampaikan program. Misal aktor perekrut “menyusup” melalui lembaga

pendidikan akan berbeda dengan aktor yang akan menggunakan media sosial. Hal ini dilakukan agar mereka tertarik dengan gerakan radikalisme yang mereka tawarkan. Disini isu-isu sentral biasanya berkaitan dengan masalah penegakan syariat Islam, Jihad maupun nilai-nilai lain yang sering kali bertentangan dengan ideologi negara.

Setelah tertarik, calon anggota secara tidak sadar akan masuk dalam kelompok radikal dan pada fase ini mereka mulai mengakui menjadi simpatisan. Pada fase ini kelompok teroris mulai memberikan penguatan-penguatan kepada anggota baru. Sampai pada satu tahap tertentu mereka kemudian di baiat sebagai kombatan yang akan diberi tugas untuk melancarkan aksi-aksi terror. Pada saat inilah para *combatan* secara *face fo face* akan berhadapan dengan negara. Para kombatan ini yang akan berhadapan dengan negara. Ketika aksi mereka gagal ada sebuah proses hukum dan biasanya akan menjerat anggota lainnya yang selama ini berkomunikasi dengan para napiter,

Tertangkapnya *combatan* ketika melakukan aksi terorisme tidak secara otomatis, menghentikan siklus dan jaringan mereka. Ketersambungan dan keterhubungan di antara mereka masih dapat terjadi dan berlangsung dengan memanfaatkan relasi personal yang tertutup. Kelompok terorisme akan terus mengelola pesan melalui berbagai sarana, melalui berbagai media dan keluarga, tetangga yang simpatisan, teman atau relasi-relasi lain sehingga pada satu sisi, tetap menyakinkan bahwa jalan yang ditempuh sudah benar, sedangkan di sisi lain, menguatkan keluarga yang ditinggalkan untuk tetap konsisten dan teguh dengan pendirian. Kelompok terorisme ini akan tetap bekerja karena mereka juga didukung pembiayaan dari sumber daya kelompok dan penyandang dana yang sulit diidentifikasi. Indikasinya dapat dilihat dari saat ketika kombatan tertangkap maka keluarga yang ditinggalkan dibantu oleh kelompok jaringan dalam berbagai aspek terutama kebutuhan dasar (sandang, pangan, kesehatan).

Kelompok teroris ini dalam gerakannya juga mendapatkan pendanaan yang sumber

dan lalu lintas keuangannya sangat kompleks yang sulit untuk dideteksi karena mereka melakukan dengan cara klasik. Mereka tidak menggunakan sistem perbankan yang bisa dengan mudah bisa dilacak. Walaupun dalam FGD tidak bisa mengungkap dari mana pendanaan kelompok mereka, namun mereka memberikan gambaran bahwa kebutuhan dasar yang dibutuhkan mereka sudah dipenuhi dari cara-cara yang mereka usahakan sendiri.

Propaganda kelompok teroris dalam cara memberi gambaran tentang kehidupan lebih baik dari tata cara sebuah negara, terciptanya keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan sejati dengan tawaran ideologi, tampaknya memang masih diminati dan memiliki daya tarik. Bahkan mereka rela meninggalkan tanah air untuk bergabung dengan kelompok ISIS misalnya ketika mereka memandang bahwa ISIS merupakan representasi mimpi mereka tentang ide-ide negara yang adil dan sejahtera. Motivasi bergabung ISIS menurut Haula Noor beragam salah satunya motif ekonomi (<https://www.bbc.com>, 2021).

Siklus bekerjanya terorisme yang demikian detail ini juga harus diikuti dalam program deradikalisasi. Komunikator dalam program deradikalisasi memegang peran penting. Mengingat, komunikator akan berhadapan dengan komunikan yang memiliki ideologi berbeda dalam memandang NKRI. Komunikator harus mampu menyangkal (*denaying*) ideologi yang mereka tentang negara. Negara NKRI dengan ideologi tentang negara dengan sistem khalifah adalah lebih baik. Komunikator dalam menyampaikan pesan terkait ideologi harus memiliki sebuah *mapping* bagaimana seseorang bisa masuk dalam ideologi yang radikal.

Penyampaian pesan dalam program deradikalisasi dilakukan melalui diskusi dan dialog. Bila komunikator tidak mempunyai kemampuan menjelaskan atau menjawab hal-hal yang diyakini para napiter maka program mengajak mereka setia kepada NKRI akan sia-sia. Misalnya, ketika menjelaskan keyakinan kelompok napiter ketika mereka melakukan perampokan.

Dalam bingkai hukum Indonesia merampok adalah tindakan pidana. Namun bagi napiter dan kelompoknya bila perampokkan untuk membiayai jihad adalah sah karena bagian dari praktek mendapatkan *fa'i* (rampasan perang yang diperoleh tanpa pertempuran). Komunikator yang terlibat dalam program deradikalisasi harus bisa mematahkan argument itu sehingga harus bisa memahami dalil-dalil tentang *fa'i*, dan melihat wacana deradikalisasi masih dalam tataran proses managerial (Karsono, 2018)

Dalam konteks ini maka pemetaan masalah tentang alasan atau penyebab napiter yang terlibat dalam aksi-aksi terorisme harus dimiliki Komunikator tidak hanya bisa menunjukkan mengapa sesuatu tindakan boleh dan tidak boleh dilakukan. Penjelasan harus holistik sehingga komunikator bisa mengalahkan argumen-argumen yang dianut kelompok teroris (*defeat*).

Selain itu institusi yang terlibat dalam program deradikalisasi harus melakukan ideologi forensik dari para napiter. Hasilnya akan menjadi salah satu metode untuk melakukan terapi kepada para napiter untuk siap kembali ke masyarakat. Mantan napiter Sofyan Tsasuri mengemukakan, keberhasilan program deradikalisasi ketika mantan napiter menyatakan kesetiaan terhadap dasar-dasar negara dan berani berbicara di forum-forum formal (<https://www.bbc.com>, 2020).

Program deradikalisasi yang dilakukan kepada napiter harus diikuti dengan aksi nyata ketika mereka telah kembali ke masyarakat. Menurut Ab mantan napiter yang terlibat dalam jaringan Nurdin M Top yang telah kembali ke NKRI mengemukakan, ketika para napiter telah menyatakan kembali ke NKRI dan menyatakan kesetiaan mereka telah ditolak oleh kelompoknya bahkan tidak boleh kembali. Seperti dipaparkan oleh Abi yang ditinggalkan istrinya selama di tahanan, "... isteri saya tetap berada di kelompok saya. Namun saya tidak lagi diterima. Jadi saya kehilangan keluarga karena memutuskan untuk menandatangani kesetiaan pada NKRI..." (disampaikan Abi dalam FGD, 12 Juli 2023)

Mengingat sasaran program

deradikalisasi masih difokuskan kepada para napiter yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, sementara anggota keluarga napiter masih tetap berada dalam kelompok jaringan teroris, maka program deradikalisasi tidak bisa serta merta memutus mata rantai radikalisme yang dilakukan oleh kelompok jaringan teroris. Selain itu tidak semua napiter bersedia mengikuti program deradikalisasi. Ketika mantan napiter ini menyatakan setia pada NKRI bukan berarti mereka tidak akan terhubung lagi dengan kelompoknya. Para mantan napiter ini tidak bisa steril dari informasi terkait radikalisme. Mengingat kelompok teroris ini akan terus melancarkan program melalui berbagai media dan menggunakan kekuatan komunikasi dari para indoktriner yang bisa menarik massa, sehingga pola seperti ini berlangsung terus menerus.

Melibatkan Masyarakat

Penelitian yang dilakukan oleh Bagus Setiani Gabi menghasilkan bahwa manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program deradikalisasi masih jauh dengan upaya penegakan hukum (Gabi, volume 2 tahun 2019). Hal itu disebabkan deradikalisasi bersifat preventif. Untuk menghancurkan sebuah kekuatan besar karena terorisme yang terputus langsung dari akarnya

Deradikalisasi sebagai sebuah program pada dasarnya tidak hanya dilihat dalam perspektif komunikasi yang sifatnya linear. Artinya ada komunikator, pesan dan komunikan. Harapannya setelah menerima informasi, maka mantan napiter yang menjadi komunikan program deradikalisasi akan berubah sikap dan menjadi tidak radikal. Hal ini berarti lingkungan masyarakat menjadi faktor penentu bagi keberhasilan program deradikalisasi, mengingat bahwa napiter yang menjadi komunikan program deradikalisasi pada akhirnya setelah keluar lapas akan berada di masyarakat.

Apabila masyarakat tidak disiapkan, dalam arti tidak pernah mendapatkan terpaan informasi yang memadai terkait program deradikalisasi maka akan sulit menerima kehadiran mantan

napiter. Mantan napiter bagaimanapun juga harus kembali berinteraksi dengan masyarakat.

Di sisi lain stigma negatif yang sudah terlanjut melekat pada diri mereka tidak bisa serta merta hilang. Kondisi ini jelas menjadi hambatan berinteraksi dalam masyarakat. Para mantan napiter meskipun telah menyatakan setia kepada NKRI, namun ketika mereka keluar dari LP mereka harus melanjutkan hidup. Tidak mudah bagi para mantan napiter ini untuk kembali melanjutkan hidup termasuk melakukan usaha atau bekerja di institusi pemerintah atau swasta.

Beberapa peserta FGD setelah keluar dari LP banyak yang bekerja serabutan seperti berwirausaha dengan berjualan bakso, soto, penjaga keamanan, petani, menjadi guru ngaji, atau bekerja dengan orang lain.

“... saya kepada orang yang mempekerjakan saya bercerita dengan sejujurnya. Namun saya minta agar identitas masa lalu saya ditutup agar tidak menyebabkan masyarakat takut. Saya sekarang menata hidup baru dan menebus kesalahan masa lalu sata ...” (paparan BS, FGD 12 Juli 2023).

BS adalah napiter yang terkena kasus Peledakan Pos Polisi di Geladak Solo dan dijatuhi hukuman 10 tahun. BS bebas tahun 2018 dan telah menyatakan setia pada NKRI. Dalam FGD juga terungkap program deradikalisasi hendaknya tidak hanya sekedar tanda tangan pernyataan setia NKRI tetapi bagaimana para napiter ini bisa melanjutkan hidup secara mandiri dari sisi ekonomi dan tidak mendapatkan tekanan.

Para napiter juga mengakui, bahwa selama ini telah banyak dilibatkan oleh pemerintah dalam program deradikalisasi dan dilibatkan dalam beberapa program yang dilakukan BNPT seperti program pemberdayaan ekonomi. Namun seringkali mereka hanya menjadi obyek sebuah proyek karena tidak ada tindak lanjutnya dari program yang melibatkan mereka. Berikut salah satu kutipan pernyataannya:

“... pernah saya dan beberapa teman napiter diundang ke satu acara di sana kami diberi bantuan gerobak untuk jualan. Namun setelah acara peresmian tidak ada

kelanjutan... dan selalu seperti itu...” (paparan K mantan napiter yang pernah terkena kasus bom Surabaya, FGD 12 Juli 2023)

Program deradikalisasi bagi mantan napiter sifatnya harus ada keberlanjutan. Mantan napiter ini harus ditempatkan sebagai subyek yang harus didengar keinginannya setelah ke luar dari Lembaga Pemasyarakatan. Mantan napiter ini sebelum menyatakan kembali ke NKRI masih mendapatkan santunan dana dari kelompoknya, namun setelah membuat pernyataan kembali ke NKRI, santunan sudah dihentikan, padahal mereka harus bertahan hidup untuk dirinya dan keluarganya. Seperti diungkapkan oleh Harits Abu Ulya, bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu pemicu mantan napiter kembali ke ideologi radikal. Dalam beberapa kasus dimana mantan napiter diberi janji untuk diberikan modal namun setelah keluar dari lapas modal tidak jadi diberikan. Hal ini memicu mental napiter sehingga bisa menjadi pendorong mereka kembali ke kelompoknya (<https://www.medcom.id>, 2023)

Mengacu pada hasil riset Ali Muhammad, Erik Hiariej, dimana pelaku usaha hendaknya juga dilibatkan dalam program deradikalisasi melalui program *Coorporte Social Responsibility* kepada mantan napiter sebagai modal usaha (Muhammad A, 2021).

Peserta FGD mengemukakan, bahwa pemerintah perlu merealisasikan janjinya kepada para napiter setelah keluar Lapas, terutama membantu memberikan bantuan modal usaha untuk kehidupan keluarganya. Dalam konteks inilah, pemerintah perlu mulai melibatkan pelaku bisnis membantu memberikan modal usaha bagi para napiter.

Perbaiki ekonomi bagi mantan napiter ini juga diperkuat dengan temuan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muhammad Nursalim, bahwa pemberdayaan ekonomi

merupakan salah satu solusi untuk menekan agar terorisme tidak berkembang (Nursalim, volume 8 tahun 2017)

Holistik

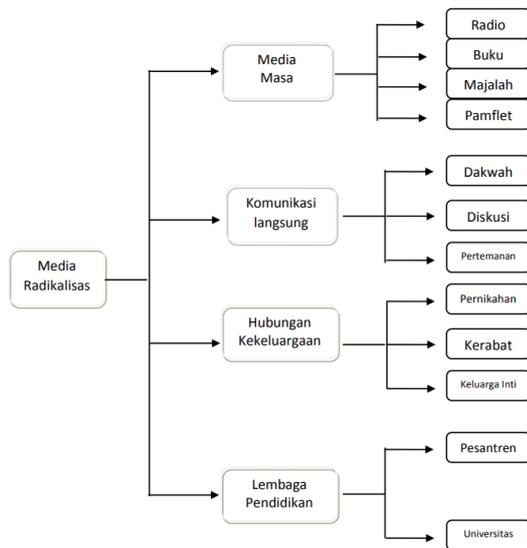
Berdasarkan temuan tersebut maka program deradikalisasi yang merupakan pendekatan *soft power* pada dasarnya tidak hanya untuk pencegahan berkembangnya paham-paham radikalisme tetapi juga memutus mata rantai dan dendam dari kelompok atau keluarga napiter.

Program deradikalisasi tidak boleh hanya berhenti pada napiter yang sedang berada dalam lembaga pemasyarakatan. Program deradikalisasi harus dilakukan kepada semua golongan yang ada dalam masyarakat. Hal ini sebagai upaya untuk menangkal upaya kelompok radikal mencari target baru.

Mengingat kelompok radikal ini akan selalu mencari target untuk mendapatkan kombatan baru, maka program deradikalisasi tidak hanya ditujukan kepada mantan napiter namun juga target-target yang menjadi sasaran kelompok radikal. Disini akan ada perang gagasan, perang ide terkait ideologi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Program deradikalisasi ini juga mengikuti pola atau siklus yang dilakukan kelompok teroris yaitu menyokong aspek sosial ekonomi para anggotanya.

Sosialisasi program deradikalisasi harus dilakukan terus menerus mulai dari lembaga pendidikan formal level pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Lembaga pendidikan non formal, serta dalam organisasi-organisasi yang ada dalam masyarakat

Mengacu pada riset yang pernah dilakukan oleh Imam Mustofa, Nurul Mahmudah (Mahmudah, 2019) dikatakan bahwa media untuk menyebarkan radikalitas melalui media massa seperti gambar 2



Gambar 2. Bagan media radikalisasi

Namun kemajuan teknologi dan informasi program radikalisasi juga sudah mulai menggunakan media sosial dalam berbagai platform. Untuk media komunikasi antar anggota kelompok radikal melalui telegram. Oleh karena itu maka program deradikalisasi semestinya mulai memikirkan dan memulai serta saatnya juga menggunakan media komunikasi yang digunakan oleh kelompok-kelompok radikal. Tidak boleh hanya pada satu jenis media saja. Bahkan bisa menggunakan berbagai media secara serempak.

Namun untuk menjaga kesinambungan, perencanaan dan pengorganisasiannya mesti tertata dan terstruktur dalam pola dan proses komunikasi strategis bagi pencegahan dan kesadaran terhadap kelompok-kelompok dan jaringan-jaringan teroris dan radikal. Misalnya, program deradikalisasi di pendidikan dasar bisa disisipkan melalui pelajaran kewarganegaraan (Pancasila) dan agama melalui basis penggunaan media sosial. Dalam konteks ini tentunya guru-guru yang mengajar mata pelajaran itu juga diberikan bekal yang cukup.

Siswa pendidikan menengah meskipun sudah disisipkan melalui dalam berapa mata pelajaran juga melalui kegiatan ekstra kurikuler seperti rohis (kegiatan keagamaan di SMA), melalui kegiatan mentoring dan lainnya. Dalam

konteks ini peran pelibatan komunikator tidak hanya guru tetapi juga pengurus OSIS dan Rohis perlu dibekali terlebih dahulu dengan materi-materi deradikalisasi. Sementara untuk organisasi kemasyarakatan bisa mengajak pemuka pendapat yang ada di masyarakat dan karang taruna. Sekali lagi komunikator hendaknya orang yang bisa dipercaya masyarakat.

Bahkan pemanfaatan media massa mainstream (TV, Radio, media cetak) maupun media online disatupadukan untuk penayangan content-kontent tentang bagaimana kehidupan mantan napter yang telah kembali ke NKRI yakni program-program yang membutuhkan dukungan masyarakat.

Media sosialnya perlu dipilih talent-talent yang bisa dipercaya dari berbagai kalangan untuk bisa menyebarkan program deradikalisasi. Bahkan kalau diperlukan mantan napter bisa menjadi vocal point yakni penyebar pesan deradikalisasi tentang bahayanya paham radikal secara terjadwal dan terencana. Penyebaran informasi secara serentak tentang deradikalisasi ini penting sebagai upaya mengalahkan (defeated) kelompok radikal yang masih terus menerus menyebarkan pahamnya yang bertentangan dengan NKRI..

Mantan napter yang menjadi peserta FGD mengingatkan bahwa ancaman radikalisme tetap akan terus ada karena napter yang bersedia ikut kembali ke NKRI tidak semua. Meteka ini jelas masih hidup dan berkeliaran dengan ideologi lamanya. Padahal, banyak varian dan tipologi gerakan radikal itu sendiri. Seperti misalnya bagaimana memantau mereka setelah mereka keluar lapas? Bagaimana dengan kelompok radikal yang dulu masuk ISIS dan kembali ke Indonesia?

Mantan napter ini mengingatkan bahwa selain mensosialisasikan program-program deradikalisasi di semua lini juga harus diikuti dengan perbaikan-perbaikan di semua sektor, terutama ekonomi. Penguatan ekonomi masyarakat diperlukan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan (1) Kelompok radikal dalam sistem politik adalah kelompok penekan yang berada di tingkat infrastruktur politik. Dalam aksi terror yang dilakukan mereka menyampaikan pesan kepada negara maupun masyarakat. (2) Kelompok radikal senantiasa mencari target baru yang akan dijadikan kombatan. Kombatan inilah yang nantinya secara *vis a vis* dengan negara. Kelompok tersebut didukung dengan finansial serta jaminan lainnya baik pada dirinya maupun keluarganya. (3) gagalnya kombatan melaksanakan aksi terror tidak menghentikan kelompok teroris ini mencari target baru. (4) Deradikalisasi sebagai sebuah pendekatan *soft power* dalam bekerjanya juga harus mengikuti cara kerja kelompok teroris. (5) target program deradikalisasi tidak hanya sebatas pada mantan napiter tetapi masyarakat yang menjadi sasaran kelompok teroris.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta.

Referensi

- (<https://www.voaindonesia.com>. (2023, February 27). Retrieved from www.suara.com: (<https://www.voaindonesia.com/a/a-32-2009-07-17-voa3-85370137/59621>).
- (2020, Februari 14). Retrieved from <https://www.bbc.com>: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51493322>
- (2021, September 21). Retrieved from <https://news.detik.com>: <https://news.detik.com/berita/d4890813/duduk-perkara-wacana-pemulangan-eks-isis>
- (2021, Februari 14). Retrieved from <https://www.bbc.com>: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51493322>
- (2023, September 8). Retrieved from <https://news.detik.com>: [\[news.detik.com\]\(https://news.detik.com\): <https://news.detik.com/berita/d-7011285/tangkap-40-teroris-jad-densus-88-mereka-berencana-gagalkan-pemilu>

\(2023, Oktober 31\). Retrieved from <https://news.detik.com>: <https://news.detik.com/berita/d-7011285/tangkap-40-teroris-jad-densus-88-mereka-berencana-gagalkan-pemilu>

\(2023, September 30\). Retrieved from <https://www.medcom.id>: <https://www.medcom.id/nasional/hukum/9K572yPb-faktor-ekonomi-memicu-mantan-napi-terorisme-kembali-radikal>

Gabi, S. B. \(volume 2 tahun 2019\). Deradicalization Crime of Terrorism Actors by Police \(Case Study in Police Jurisdiction of Semarang\). *Journal Daulat Hukum*.

Hakeem, O. &. \(2020\). Non-military Approach Against Teorrorism in Nigeria : deradicalization Strategies and Challenges in Countering Boko Haram. *Security Journal Volume 33*.

Hendropriyono. \(2009\). *Terorisme Fundamentalis kristen Yahudi, Islam*. Jakarta: Kompas-Gramedia.

<https://lampung.antaranews.com>. \(2023, September 8\). Retrieved from <https://news.republika.co.id>: <https://lampung.antaranews.com/berita/653797/108-narapidana-teroris-ucapkan-ikrar-setia-nkri>

Junaid, H. \(volume 2 tahun 2013\). Pergerakan Kelompok Terorisme. *Jurnal Suesana*.

Junaidi, F. \(2017\). Relasi Terorisme dan Media. *Jurnal Aspikom*.

Karsono, B. \(2018\). *Memahami Radikalisme Islam dari Akar Persoalannya Agenda Strategis bagi Pluralisme dan keutuhan Bangsa perspektif Agama, Sosial Budaya dan Keamanan*, . Jakarta: Ubhara Jaya Press.

Lequeur, W. \(2005\). *New Terrorism \(Fanatisme dan Senjata Pemusnah Massal*. Yogyakarta: Juxtapose Research dan Publication Press.

Mahmudah, N. &. \(2019\). *Radikalisasi dan Deradikalisasi : Pemahaman Islam*. Yogyakarta: Metrouniv Press.

Muhammad A, H. E. \(2021\). Deradicalization Program in Indonesia Radicalizing the Radicals. *Journal Cogent Social Sciences*](https://news.detik.com/berita/d-6486004/kepala-bnpt-475-</p>
</div>
<div data-bbox=)

Volume 7.

- Mustofa, M. (2002). Memahami Terorisme Suatu perspektif Kriminologi. *Jurnal kriminologi Indonesia, Volume 2.*
- Noricks, D. M. (2009). Disengagement and Deradicalization : Processes and Programs. *Journal Social Science for Counterterrorism : Putting the Pieces Together.*
- Nursalim, M. (volume 8 tahun 2017). Deradikalisasi Terorisme : Studi Atas Epostemologi, Model Interpretasi dan Manipulasi Pelaku Teror. *Journal Kalam.*
- Zulfikar, A. (volume 4 tahun 2019). Swa-Radikalisasi Melalui Media Sosial di Indonesia. *Jurnal Jurnalisa.*